



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipegaruhi oleh sisi suplay (penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Karakteristik tingkat inflasi yang kurang stabil di Indonesia menyebabkan deviasi yang lebih besar dari proyeksi inflasi tahunan oleh bank indonesia (dibanding deviasi antara realisasi inflasi dan target bank sentral di negara lain. Untuk itu bank indonesia dengan pemerintah berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan, dengan melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinasi bidang Perekonomian 148/2017 yang menjadi Dasar Hukum penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi yang tujuannya sebagai Pedoman Pengendalian Inflasi Nasional dan Daerah, dasar Penyusunan Program Kerja TPIP secara Periodikal, Evaluasi Road Map dan Program Kerja kedepan akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden pada Rakornas, memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan Program Kerja TPID dengan Karakteristik daerah, mendorong daerah untuk membuat inovasi program;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional; dan Diktum kelima keputusan menteri dalam negeri Nomor : 500.05-8135 Tahun 2017 tentang tim pengendalian inflasi daerah;
3. Keputusan Menteri koordinasi bidang perekonomian 148/2017 tentang dasar hukum penyusunan peta jalan pengendalian inflasi;
4. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pagar Alam Tahun 2022-2024 berpedoman pada Peta Jalan dan Rencana Aksi

Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam dan Instansi Vertikal yang terkait dengan penuh rasa tanggung jawab;

KETIGA : Peta Jalan dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah yang tercermin dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dan peta jalan tersebut diharapkan bersinergi dengan program yang ada di Dinas/Badan/Kantor maupun Instansi Vertikal terkait di tingkat Kota Pagar Alam, di tingkat Kecamatan ditingkat Kelurahan se-Kota Pagar Alam serta bersinergi dengan program kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tidak bertentangan dengan program Pengendalian Inflasi Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Instansi terkait Tahun Anggaran 2022, Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR : 175 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN PETA JALAN RENCANA
AKSI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2024

TANGGAL : 24 Mei 2022

PENETAPAN PETA JALAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022-2024

I. Keterjangkauan Harga

No	Kunci Strategis	Program Strategis	Program Kerja 2022-2024	Time Lime Target		Keterangan
	4K			2022-2024		
1	2	3	4	5	6	
1.	Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1. Review harga eceran tertinggi dan atau harga acuan pembelian dan penjualan.	Melaksanakan operasi pasar dan Sidak pasar, (dilaksanakan Operasi pasar dan pasar murah pada saat menjelang hari besar keagamaan dan hari besar nasional).	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Bulog, Pol PP, Dinas Perhubungan, Polres, Dinas Komunikasi dan Informatika.	
			2. Peningkatan stabilisasi harga dan stok bahan pokok,	Melakukan pemantauan perkembangan harga pangan pokok melalui sistem informasi	Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi	

		melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah dan satgas pangan.	aplikasi Sei Musi, Informasi Harga Pasar di 5 Kecamatan dan Informasi Harga Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bekerja sama dengan Satgas Pangan guna mencegah terjadinya penimbunan dan hal lainnya yang mengganggu ketersediaan pasokan pangan	dan UKM, Dinas Pertanian,Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sat Pol PP, Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika.
		3. Optimalisasi kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga beras.	Tersalurnya Rastra dan Bansos ke masyarakat. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Sosial (Bansos). Terpenuhi dan tersalurnya beras bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam melalui BUMD Sei Sembilang	Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Sat Pol PP, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bappeda, Polres, Dandim.
		4. Penetapan kebijakan harga komoditas yang diatur pemerintah telah dikoordinasikan dengan mempertimbangkan sasaran inflasi IHK dan kondisi fiskal	Optimalisasi Gerakan Stabilitas Harga Pangan (GSHP) dan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) dengan mobilitas di pasar. stabilnya harga beras, daging, minyak goreng, tepung dan komoditas lainnya.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bappeda

				Terpantaunya harga Komoditas pangan strategis secara harian, mingguan, bulanan. Terselenggaranya Kegiatan Pasar Tani dan Toko Tani. Melakukan Kemandirian Pangan rumah tangga antara lain melalui gerakan tanam sayur (Gertas), Gerakan Pengembangan Perikanan Rakyat (Gerbang Perak), Gerakan Masyarakat Beternak Unggas (Gemar Tugas). Rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bappeda
	Mengelola permintaan	1. Menjaga keseimbangan internal perekonomian			

II. Ketersediaan Pasokan

No	Kunci Strategis		Program Strategis	Program Kerja 2022-2024	Time Lime Target		Keterangan
	4K				2022-2024		
1	2	3	4	5	6		
1.	Ketersediaan Pasokan	1. Produksi Domestik	1.Perluasan adopsi teknologi dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas UMKM pangan.	Pembinaan pada UMKM binaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Pertenakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.		

			2. Pengembangan Pangan (Food Estate) melalui Peningkatan Pangan/Horti Lumbung Estate) melalui Produksi	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah yang terkena bencana, Penyusunan Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kota. Ketersediaan pasokan pangan melalui pembinaan dan pemanfaatan kluster pangan BUMD Pangan untuk optimalisasi penyerapan dan penyaluran beras petani Pagar Alam Penyusunan Neraca Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
		3. Pengembangan Hortikultura	Kampung	Pemetaan pola tanam di tiap sentra produksi komoditas pertanian. Perencanaan pemanfaatan Teknik pertanian modern untuk meningkatkan hasil produksi Menyediakan data dan informasi tentang penyediaan /pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun gizi.	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

		4. Pembangunan dan Optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur Pertanian.	Program Percetakan Lahan Sawah Baru. Pemetaan Lahan Pertanian Pengelolaan dan Pengembangan lahan rawa dan irigasi. Pembangunan irigasi pertanian Mempertahankan areal pertanian untuk Ketahanan Pangan.	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
		5. Peningkatan Produksi Protein Hewani	Melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengkonsumsi bahan pangan substitusi seperti ikan dan daging beku	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
	2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	1. Penguatan Kelembagaan	Penguatan kelembagaan untuk Gapoktan mempermudah akses kepada sarana produksi dan modal kerja Penguatan pengelolaan koperasi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan pasca panen, dan pemasaran. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

					Peningkatan SDM pertanian melalui pelatihan, magang, penyuluhan dan pembinaan.	
--	--	--	--	--	--	--

III. Kelancaran Distribusi

No	Kunci Strategis		Program Strategis	Program Kerja 2022-2024	Time Lime Target		Keterangan
	4K	2			2022-2024		
1	2		3	4	5	6	
1.	Kelancaran distribusi	Penguatan Kerja Sama antar Daerah (KAD)	1.Penguatan dan perluasan Kerjasama antar Daerah (KAD)	Memfasilitasi kerjasama antar daerah baik bersifat Government to Government maupun Business to Business Melakukan pemetaan komoditas di 5 Kecamatan Terpetanya komoditas unggulan di setiap Kecamatan. Melakukan review regulasi yang menghambat perdagangan antar daerah.		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian dan administrasi Pembangunan, Bagian Tata Pemerintah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Bappeda.	
		Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	1.Peningkatan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah	Pembangunan jalan di sentra produksi. Revitalisasi pasar tradisional Pemanfaatan Gudang pangan Tercapainya pemenuhan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas Komunikasi dan	

				kebutuhan bahan baku minyak dan gas rumah tangga. Mendukung perluasan jaringan internet sampai ke desa-desa untuk memperluas akses informasi harga pangan dan kebijakan stabilitas harga	Informatika, Polres.
				Pengangunan kolaborasi sinergitas dan kerjasama dengan stakeholder.	

IV. Komunikasi Efektif

No	Kunci Strategis		Program Strategis	Program Kerja 2022-2024	Time Lime Target		Keterangan
	4K				2022-2024		
1	2	3	4	5	6		
1.	Komunikasi Efektif	Memperbaiki Kualitas data	1. Penyediaan Informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah	Melakukan survei harga pangan dan komoditas penyumbang inflasi secara harian. Tersedianya survei harga yang akurat.	BPS, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Bappeda, Polres, Sat Pol PP, Kodim.		
			2. Pemanfaatan informasi harga untuk pengendalian inflasi.	Masyarakat mendapatkan informasi perkembangan harga terkini melalui chanel/media masa, media sosial.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Bappeda, Dinas Ketahanan		

			Pembuatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PHPS) yang memuat informasi harga (Konsumen).	Pangan dan Perikanan dan Dinas Pertanian.
Koordinasi dan Pusat Daerah	Penyusunan Peta Jalan TPID sebagai tindak lanjut peta jalan pengendalian inflasi nasional	Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOOP) mengatasi gejala pangan termasuk operasi pasar. Tersedianya Standar Operasional Prosedur mengatasi gejala harga pangan.	Standar (SOOP)	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Bappeda, Bagian Perekonomian dan adm. Pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	Program komunikasi kepada masyarakat (edukasi publik untuk pengelolaan ekspektasi dan komunikasi secara bijak.	Terwujudnya masyarakat yang positif terhadap kenaikan harga pangan. Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat pedesaan. Pemanfaatan media untuk diseminasi kebijakan pengendalian inflasi Seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat mendokumentasikan kegiatan yang berkaulitas dengan pengendalian inflasi secara baik.	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Lainnya.

				Terbentuknya standar operasional prosedur yang efektif dan cepat untuk mengatasi gejolak harga yang signifikan. Terwujudnya koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan terciptanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang solid dan efektif	
--	--	--	--	--	--

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI